

## Masih Banyak Warga Karawang yang BAB Sembarangan

**KARAWANG (IM)** - Pemerintah Kabupaten Karawang menghadapi persoalan masih adanya perilaku warga tidak sehat, terutama masalah buang air besar sembarangan.

Kepala Bidang Prasarana dan Tata Ruang Bappeda Karawang, Dalli Kusnadi di Karawang, Sabtu, mengatakan saat ini pihaknya tengah mengejar target akses sanitasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) pada tahun 2025.

Hal tersebut dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Namun diakuinya, hingga kini Karawang masih memiliki pekerjaan rumah yang belum tuntas soal perilaku yang tidak sehat, terutama masalah buang air besar sembarangan (BABS).

"Kami terus berupaya

untuk mengatasi permasalahan itu dengan menyediakan akses sanitasi layak, sehingga tidak ada lagi masyarakat Karawang yang BABS dan Karawang terbebas dari BABS atau Open Defecation Free (ODF)," ungkap Dalli.

Kepala Seksi Lingkungan Kesehatan Dinkes Karawang, Dwi Teguh Wibowo menyampaikan perilaku pola hidup bersih dan sehat harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mau mengubah dari pola hidup tidak sehat menjadi sehat.

"Saat ini kami masih menyalakan PR sekira 20 persen menuju ODF. Kami optimis pada 2025 mendatang Kabupaten Karawang sudah ODF," katanya.

Sementara itu, di sepanjang jalan raya di wilayah perdesaan Karawang hingga kini masih banyak "helikopter" atau tempat buang air besar di atas saluran irigasi. ● **pur**

# 8 | Nusantara

IDN/ANTARA



## PROGRAM BUMDES JABAR JUARA

Suasana pertokoan milik Pemerintah Desa Darmaraja yang disewakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bangkit di Dusun Awilur, Desa Darmaraja, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Minggu (19/9). Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengupayakan kemajuan desa untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di desa dengan meluncurkan program BUMDes Jabar juara.

## Ade Yasin dan Bupati Cianjur Desak Pemerintah Bangun Jalur Puncak II

Ade mengaku telah mendorong pembangunan Jalur Puncak II yang juga disebut Poros Tengah Timur (PTT), namun pengajuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu tidak membuahkan hasil.

**PUNCAK (IM)** - Bupati Bogor, Ade Yasin mendesak pemerintah membangun Jalur Puncak II sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jalur Puncak.

Sistem ganjil genap atau satu arah dikatakan hanya penanganan jangka pendek.

Ade mengaku telah mendorong pembangunan Jalur Puncak II yang juga disebut Poros Tengah Timur (PTT), namun dia bilang pengajuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tidak membuahkan hasil.

Ia kali ini meminta Ke-

Rp5 miliar buat membuka sebagian lahan bersama TNI.

Namun dia menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bogor tak sanggup mendanai pembangunan jalan sepanjang 48,7 kilometer yang diperkirakan butuh dana Rp5 triliun untuk menghubungkan Sentul Bogor dengan Istana Cipanas di Cianjur.

"Kalau secara nasional memang angka segitu kecil, saya kira perkiraan Rp5 triliun itu termasuk jembatan-jembatan yang melalui sungai, perkiraan segitu tuntas seluruhnya," kata dia.

Sementara Herman menjelaskan permintaan pembangunan Jalur Puncak II murni berasal dari aspirasi warga untuk kemudahan akses ke daerah lain.

Pihaknya dikatakan juga sudah berinisiatif melakukan penataan kecil di Jalur Puncak II yang masuk dalam Kabupaten Cianjur. Target dia pembangunan selesai pada 2022.

Kami mengingatkan

bapak-bapak di (pemerintah) pusat bahwa ini aspirasi dari bawah. Kami benar merasakan, dari Jakarta mau ke Cianjur macet, dari Bandung macet," papar Herman.

"Saat ini kami sedang memagaskan jalur exiting, yang panjangnya 9,2 kilometer dan lebarnya 4-5 meter. Insya Allah tahun ini tersisa 2 kilometer lagi, tahun depan akan selesai," kata Herman lagi.

Kepada Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN), ia menyampaikan bahwa developer PT. NPM yang dimiliki PT. Sentul City Tbk juga berkenan memberikan lahannya untuk membangun Jalur Puncak II tersebut.

"Menteri ATR/BPN menyetujui bahkan sangat mendukung jikalau PT. PNM yang dimiliki PT. Sentul City menyerahkan sebagian lahannya untuk membangun Jalur Puncak II yang punya total lebar 30 meter," sambunginya.

Untuk sisa beberapa meter

milik masyarakat Kabupaten Cianjur yang akan masuk dalam rencana pembangunan Jalur Puncak II, Maman yang merupakan mantan Direktur Utama PDAM Tirta Murti mengaku akan membebaskan lahan tersebut.

Sementara Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin menambahkan selain PT. Sentul City Tbk, konglomerat atau pihak swasta lainnya juga sudah siap menghibahkan sebagian lahannya untuk membangun Jalur Puncak II atau PTT.

"Jalur Puncak II atau PTT ini akan nyambung dengan Jalan Bojonggede-Kemang (Bomang) dan Jalan Tol Antasari, Pemkab Bogor hingga kini belum mengeluarkan uang sepersen pun untuk pembebasan lahannya, nanti kalau sudah berjalan, sedikit lahan milik masyarakat yang masuk ke dalam rencana pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 48 Km, kami siap membebaskan lahannya," tambah Burhanudin. ● **gio**

## Satpol PP Bogor Sebut Anggotanya Cekik Warga Gegara Tersulut Emosi

**CIBINONG (IM)** - Satpol PP Kabupaten Bogor membenarkan anggotanya mengecek warga saat penertiban di sekitar Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Anggotanya itu tersulut emosi.

"Memang anak ini anak baru, dia belum dilakukan pelatihan secara mental dan spiritual, belum dilakukan, karena anak ini pengganti dari anak yang mengundurkan diri. Sehingga belum pernah dilakukan itu," kata Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Iman Budiana saat dikonfirmasi, Minggu (19/9).

Iman menjelaskan, aksi cekik oknum anggota Satpol PP itu terjadi pada Sabtu (18/9) sore. Saat itu, pria berseragam Satpol PP dalam video tersebut sudah bertugas sejak subuh untuk mengamankan kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, dari kerumunan dan pedagang liar.

Saat sore hari, lanjut Budi, petugas Satpol PP kemudian melakukan penertiban terhadap pedagang liar yang mulai berjualan menjelang malam akhir pekan. Hingga akhirnya petugas itu bertemu pedagang yang disebut sudah seringkali diingatkan, namun tidak mengindahkan peringatan petugas Satpol PP.

"Jadi itu berdasarkan via telpon yah, jadi mereka bertugas sejak subuh di

Pakansari, ya mungkin yah, mengamankan di sana capek juga, kemudian begitu ada yang menyulut, pasti lah namanya manusia, orangnya itu-itu juga lagi, ya sudah pasti lah ya, namanya orang di lapangan beragam gitu ya," kata Budi.

Sebuah video yang menayangkan aksi arogansi anggota oknum Satpol PP di Kabupaten Bogor viral di media sosial. Dalam video tersebut nampak seorang anggotanya Satpol PP sempat beradu mulut dengan pedagang dan mengecek seorang pria.

Dalam video berdurasi 9 detik itu nampak seorang pria berseragam Satpol PP tengah melakukan penertiban terhadap pedagang di pinggir jalan raya.

Pria berseragam tersebut nampak tengah beradu mulut dengan seorang perempuan berjilbab yang diduga pemilik dagangan yang akan diangkut petugas Satpol PP.

"Lu jangan bawa ke mana-mana. Jangan sampai gue banting nih," kata perempuan berjilbab itu sambil mengangkat termos yang diambilnya dari gerobak dagangan.

Rekaman video adu mulut itu berakhir dengan aksi cekik anggota Satpol PP terhadap pria berkaos putih yang diduga anak dari perempuan berjilbab pedagang kaki lima. ● **pur**

## RS PMI Bogor Kenalkan Pengobatan Akupuntur untuk Long Covid-19

**BOGOR (IM)** - Memperingati hari jadi ke-76 Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (RS PMI) Bogor, menghadirkan penambahan layanan kesehatan dan teknologi untuk memudahkan pasien juga keluarga yang membutuhkan layanan mudah serta cepat.

Di antaranya yang terbaru RS PMI memperkenalkan pengobatan akupuntur medis untuk gejala setelah Covid-19 atau long Covid-19 serta berkomitmen mempermudah pelayanan dan administrasi bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau BPJS Kesehatan khususnya penyandang thalasemia mayor dan hemofilia yang menjalani terapi rutin transfusi darah, obat antihemofilia, dan obat kelasi besi.

Direktur Utama RS PMI Bogor, Djoko Setionegoro mengatakan, pihaknya menghadirkan pengobatan akupuntur medis untuk long Covid-19, perawat akupuntur medis ini disertai ruangan yang representatif, jadi ruang ini bisa melihat view Kebun Raya Bogor (KRB).

"Sekarang ini banyak sekali kasus setelah sembuh Covid-19 ada gejala kecemasan, nyeri sendi dan sakit kepala. Jumlahnya tidak sedikit, inframasi di persendian menjadi fokus tindakan akupuntur medis," ungkap Djoko didampingi direktur Umum dan PIt Keuangan M. Arfan F serta direktur pelayanan medik dan keperawatan Banon Suoandari pada Minggu (19/9).

Djoko melanjutkan, awalnya akupuntur medis ini diarahkan untuk kasus nyeri, treatment stroke dan

sakit pinggang juga leher yang kondisinya tidak sehat. Kemudian bisa juga untuk mengatasi kegemukan, mengikuti perkembangan saat ini setelah banyak pasien Covid-19, ada kunjungan dari pasien yang sudah sembuh Covid-19 tetapi ada gejala setelahnya.

"Memang kemarin cukup tinggi gejala setelah Covid-19. Angka pasien pasca Covid-19 dari berbagai gejala yang tadi disebutkan. Maka itu dibuka pengobatan akupuntur medis untuk long Covid-19. Karena setelah mengobati, kami membuka layanan konsultasi bahkan dengan telekonsultasi juga bisa," tambahnya.

Djoko juga mengatakan, selain itu pihaknya juga bekerjasama dengan BPJS Kesehatan menghadirkan kemudahan akses pelayanan dan administrasi bagi peserta JKN-KIS khususnya penyandang thalasemia mayor dan hemofilia yang menjalani terapi rutin transfusi darah, obat antihemofilia, dan obat kelasi besi di rumah sakit. RS PMI juga menjadi pusat Thalassemia di Kota Bogor yang didukung oleh dr. Hikari Sp. A (K) sebagai Konsultasi hematologi.

"Kami berikan pelayanan terbaik untuk pasien thalasemia, karena yang banyak orang tahu penyakit darah itu anemia tapi ini thalasemia dengan perawatan khusus. Saat ini RS PMI Bogor sudah banyak mengalami perubahan menjadi lebih modern disertai dengan penambahan layanan kesehatan dan teknologi terkini seperti sistem pendaftaran online (mobil app), layanan antar obat dan telekonsul," tuturnya. ● **gio**

Ade mengaku telah mendorong pembangunan Jalur Puncak II yang juga disebut Poros Tengah Timur (PTT), namun pengajuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu tidak membuahkan hasil.

**PUNCAK (IM)** - Bupati Bogor, Ade Yasin mendesak pemerintah membangun Jalur Puncak II sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jalur Puncak.

Sistem ganjil genap atau satu arah dikatakan hanya penanganan jangka pendek.

Ade mengaku telah mendorong pembangunan Jalur Puncak II yang juga disebut Poros Tengah Timur (PTT), namun dia bilang pengajuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tidak membuahkan hasil.

Ia kali ini meminta Ke-

Rp5 miliar buat membuka sebagian lahan bersama TNI.

Namun dia menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bogor tak sanggup mendanai pembangunan jalan sepanjang 48,7 kilometer yang diperkirakan butuh dana Rp5 triliun untuk menghubungkan Sentul Bogor dengan Istana Cipanas di Cianjur.

"Kalau secara nasional memang angka segitu kecil, saya kira perkiraan Rp5 triliun itu termasuk jembatan-jembatan yang melalui sungai, perkiraan segitu tuntas seluruhnya," kata dia.

Sementara Herman menjelaskan permintaan pembangunan Jalur Puncak II murni berasal dari aspirasi warga untuk kemudahan akses ke daerah lain.

Pihaknya dikatakan juga sudah berinisiatif melakukan penataan kecil di Jalur Puncak II yang masuk dalam Kabupaten Cianjur. Target dia pembangunan selesai pada 2022.

Kami mengingatkan

bapak-bapak di (pemerintah) pusat bahwa ini aspirasi dari bawah. Kami benar merasakan, dari Jakarta mau ke Cianjur macet, dari Bandung macet," papar Herman.

"Saat ini kami sedang memagaskan jalur exiting, yang panjangnya 9,2 kilometer dan lebarnya 4-5 meter. Insya Allah tahun ini tersisa 2 kilometer lagi, tahun depan akan selesai," kata Herman lagi.

Kepada Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN), ia menyampaikan bahwa developer PT. NPM yang dimiliki PT. Sentul City Tbk juga berkenan memberikan lahannya untuk membangun Jalur Puncak II tersebut.

"Menteri ATR/BPN menyetujui bahkan sangat mendukung jikalau PT. PNM yang dimiliki PT. Sentul City menyerahkan sebagian lahannya untuk membangun Jalur Puncak II yang punya total lebar 30 meter," sambunginya.

Untuk sisa beberapa meter

milik masyarakat Kabupaten Cianjur yang akan masuk dalam rencana pembangunan Jalur Puncak II, Maman yang merupakan mantan Direktur Utama PDAM Tirta Murti mengaku akan membebaskan lahan tersebut.

Sementara Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin menambahkan selain PT. Sentul City Tbk, konglomerat atau pihak swasta lainnya juga sudah siap menghibahkan sebagian lahannya untuk membangun Jalur Puncak II atau PTT.

"Jalur Puncak II atau PTT ini akan nyambung dengan Jalan Bojonggede-Kemang (Bomang) dan Jalan Tol Antasari, Pemkab Bogor hingga kini belum mengeluarkan uang sepersen pun untuk pembebasan lahannya, nanti kalau sudah berjalan, sedikit lahan milik masyarakat yang masuk ke dalam rencana pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 48 Km, kami siap membebaskan lahannya," tambah Burhanudin. ● **gio**

## Publikasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor Tahun 2021

**DINAS** Sosial Kabupaten Bogor pada semester pertama TA 2021 telah melaksanakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

### 1. BIMBINGAN SOSIAL PENDAMPING ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SE-KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021

Tujuan dari kegiatan Bimbingan Sosial Pendamping Bagi Anak Berkebutuhan Khusus se-Kabupaten Bogor. adalah untuk meningkatkan pembinaan kepada para pendamping Anak Berkebutuhan Khusus dan meningkatkan Pengetahuan serta Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Bogor.

#### SASARAN KEGIATAN

50 orang Pendamping Anak Berkebutuhan Khusus Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret s/d 1 April 2021, tempat Hotel Gumilang Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan koordinasi dengan:

- Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK);
- Kasi PKM kecamatan;
- Bappeda Litbang;
- Narasumber.

No Nama Instansi/Lembaga Keterangan

1. Drs. Erniyanto, M.Si Kementerian Sosial RI Narasumber

2. Adun Abdullah Syafiq, M.Ag Dinas Sosial Prov Jawa Barat Narasumber

Hasil :

- Tersosialisasinya program Rehabilitasi Sosial kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat melalui Bimbingan Sosial Pendamping Sosial Anak Berkebutuhan Khusus di Hotel Gumilang Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- Tercapainya target jumlah peserta kegiatan Bimbingan Sosial Pendamping Sosial Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sejumlah 50 orang.



### 2. BIMBINGAN SOSIAL BAGI PENDAMPING SOSIAL LANJUT USIA SE-KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021

Tujuan :

- Meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepada para Pendamping Sosial Lanjut Usia dalam penanganan dan pendampingan terhadap Lanjut Usia Potensial, Non Potensial dan Terlantar;
- Wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Bogor umumnya kepada masyarakat kabupaten Bogor khususnya dan kepada Lansia yang membutuhkan Pelayanan Sosial dan Pendampingan;
- Pendamping Sosial Lanjut Usia mampu memberikan pendampingan kepada Lanjut Usia agar mampu mengembalikan keberfungsian sosialnya ke arah yang lebih baik.

#### TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

- Hari : Senin s/d Kamis  
- Tanggal : 5 s/d 8 April 2021  
- Waktu : Senin, Cek In 12.00 WIB s/d 15.00 WIB  
- Tempat : THE RIZEN HOTEL  
Jl. Raya Puncak Km. 83 Cibeurum, Cisarua Bogor

#### PELAKSANA KEGIATAN

• Peserta :  
Pesertasebanyak 40 orang Pendamping Sosial Lanjut Usia di setiap Kecamatan.

• Narasumber :  
- Eselon III Pusat : 1 Orang / Kementerian Sosial RI  
- Eselon III BRSLU (BEKASI) : 1 Orang / BRSLU Bekasi

• Moderator :  
- Sakti Peksos : 1 Orang / Sakti Peksos Dinas SosialKab. Bogor

Hasil :

- Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) itu tidak dilakukan di Kementerian Sosial melainkan di Balai-Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang terdekat adalah Balai Rehabilitasi Sosial Budhi Dharma Bekasi;
- Program Lansia Kit : Paket bantuan operasional AT-ENSI yang diperuntukan bagi lanjut usia dengan komposisi bantuan sandang, pangan, tempat tinggal, perlengkapan dan vokasional berupa :

- Sandang (Baju Koko, Sarung, Perlengkapan Ibadah, Selimutdsb);
- Pangan (Makanan Pokok, Makanan Tambahan, Nutrisi, Vitamin);
- Papan/Sarana Kamar (Kasur, Lemari, Bantal, Kelambu, dsb);
- Perlengkapan yang terdiri atas alat bantu seperti kamata, alat bantu dengar dan Aksesibilitas seperti kursi roda, walker, dsb).

- Program ATENSI Asistensi Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memberikan pelayanan/bantuan sosial kepada orang dengan masalah kesejahteraan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak dan dapat melakukan fungsi sosialnya;
- ATENSI Layanan Langsung Pemberian layanan pendampingan, dukungan dan/atau bantuan rehabilitasi sosial yang diberikan UPT (balai besar, balai/loka) kepada individu penerima manfaat (PM), kepada keluarga PM, dan kepada komunitas dimana PM tinggal.

3. KEGIATAN BIMBINGAN REHABILITASI SOSIAL PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) BAGI TIM REAKSI CEPAT DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021

Maksud :  
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan mendukung mewujudkan Panca Karsa Kabupaten Bogor yaitu :

- Bogor cerdas;
- Bogor sehat;
- Bogor maju;
- Bogor membangun; dan
- Bogor berkeadilan.

Tujuan :

Tujuan dari Kegiatan Bimbingan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) Bagi Tim Reaksi Cepat Di Kabupaten Bogor adalah :

- Mencegah dan mengurangi tumbuh kembang serta meluasnya masalah kesejahteraan sosial;
- Mencegah perilaku sosial yang dapat menimbulkan keresahan dan ketertiban umum;
- Mengetaskan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial

(PPKS) agar dapat hidup layak guna memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial.

#### A. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Tempat  
Tempat pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Bagi Tim Reaksi Cepat Di Kabupaten Bogor bertempat di Hotel Accram yang beralamat di Jl. Raya Puncak - Cipayung KM.75 No. 100 Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung;

2. Waktu  
Waktu Kegiatan Bimbingan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) Bagi Tim Reaksi Cepat Di Kabupaten Bogor di laksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut dari hari Kamis dengan Jumat tanggal 10 Juni 2021 sampai 11 Juni 2021.

#### B. HASIL YANG DICAPAI

- Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) Bagi Tim Reaksi Cepat di Kabupaten Bogor;
- Meningkatkan Kesejahteraan bagi PPKS Tuna Sosial sehingga terwujud Kabupaten Bogor bebas PMKS;
- Menurunnya Populasi PMKS di Jalanan;
- Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di bentuk.



#### 4. KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN BOGOR (USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI KARANG TARUNA) TAHUN ANGGARAN 2021 DI HADIRI OLEH 80 PESERTA DARI 40 KECAMATAN

Karang Taruna sebagai tenaga penggerak pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat desa/keurahan memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan masyarakat.

Untuk dapat meningkatkan potensi dan peranaktifnya, diperlukan upaya pengembangan jaringan Komunikasi, Kerjasama, Sinergi dan Kolaborasi antar Karang Taruna di wilayah Kabupaten Bogor.

Peran aktif Karang Taruna dalam kegiatan usaha-usaha kesejahteraan sosial sudah cukup dirasakan, terutama dalam penanganan pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Oleh karena itu, Karang Taruna di harapkan dapat mengali segala aspek yang menyangkut permasalahan kesejahteraan sosial di masing-masing wilayah sesuai karakteristik yang ada, sekaligus menghasilkan Rumusan, Model maupun pelaksanaan:

Hari : Rabu s/d Jumat  
Tanggal : 16 s/d 18 Juni 2021  
Waktu : 12.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Hotel Bale Arimbi Jl. Raya Puncak Cibogo II No.21, Cipayung Datar, Kec. Megamendung, Bogor, Jawa Barat

